

## **RELIGIOUS PEACE BUILDING: DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI AGAMA**

**Dendi Sutarto**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Kepulauan,  
Indonesia  
dendi\_sutarto@yahoo.co.id

### **Abstrak**

Dalam masyarakat agama seringkali menampilkan pemahaman yang sempit hingga melahirkan *violence* dan *war*. Agama yang seringkali dihadirkan dalam ruang yang sempit, yang hanya menjadi legitimasi atas berbagai peperangan dan diskriminasi (*holy wars*) yang merupakan bentuk “jihad” demi membela kebenaran. Pada konteks masyarakat multikultural pemahaman agama seringkali dihadirkan dalam wujud yang kehilangan substansi nilai universal dan toleransi. Seharusnya nilai-nilai agama diwujudkan dalam pola perilaku sosial *humanity* yang menyejukkan, toleran, dan tidak diskriminasi, sehingga penting *religious peace building* menjadi paradigma kolektif dalam kehidupan *social-religious* yang menyatukan unsur-unsur keberagaman dalam masyarakat multikultural. Penelitian ini dalam kerangka analisis sosiologis, dengan menganalisis data-data literatur sebagai data primer. Penelitian ini adalah penelitian literatur dengan metode *literature review* perspektif sosiologis yang berusaha memahami pemahaman dan pemikiran dalam konteks sosiologis tindakan sosial. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa secara sosiologis pemahaman dan pemikiran atas nilai-nilai agama yang bersifat terbuka, toleransi, anti diskriminasi, universal dan menyejukkan perlu dibangun sebagai tindakan dan nilai-nilai dalam sistem *socio religious* dalam memelihara keberagaman dan perdamaian.

Kata kunci: religi, *pace building*, multikultural, sosiologi.

### **Abstrack**

*In religious societies, a narrow understanding often emerges that only breeds violence and war. Religion which is often presented in a narrow space, which only becomes the legitimacy of various wars and discrimination (holy war) which is a form of "jihad" in defense of the truth. In the context of multicultural societies, religious understanding is often presented in a form that loses the substance of universal values and tolerance. Religious values must be manifested in patterns of human social behavior that are calming, tolerant, and non-discriminatory, so it is important that religious peace building becomes a collective paradigm in socio-religious life that unites elements of diversity in multicultural societies. This research is within the framework of sociological analysis, by analyzing literature data as primary data. This research is a literature study with a literature review method from a sociological perspective that seeks to understand understanding and understanding of the social context of social action. The results of this study reveal that sociological understanding and thinking of religious values that are open, tolerant, anti-discrimination, universal and soothing need to be built as actions and values in the religious social system in maintaining peace and peace.*

*Keywords: religion, pace building, multicultural, sociology.*

## PENDAHULUAN

Sepanjang sejarah, agama mempunyai implikasi terhadap munculnya *violence* dan *war* (Carter dan Smith, 2004: 279). Agama yang seringkali dihadirkan dalam ruang yang sempit, yang hanya menjadi legitimasi kekuasaan, kebenaran atas berbagai konflik, peperangan (*holy wars*) yang merupakan bentuk “jihad” (demi membela kerajaan suci) yang kemudian terjadinya (kekerasan di kerajaan surgawi). Maka tidak heran jika agama yang dihadirkan telah kehilangan substansi nilai universal, keramahan dan kesejukan. Dengan kondisi seperti inilah Friedrich Nietzsche mengatakan tentang “kematian Tuhan” agama telah menjadi sesuatu yang dilematis (Sutarto, 2017). Karena nilai-nilai agama tidak dihadirkan dalam pola perilaku sosial humanity yang menyejukkan, dan toleran dalam konteks masyarakat multikultural, sehingga kemudian pemahaman yang sempit terhadap agama melahirkan ketegangan, konflik-konflik laten yang berakibat sangat fatal dan dahsyat dalam kehidupan social-religious, seperti Persang Suci (1096-1270 M), tragedi 11 September (Markham dan Rabi, 2002), konflik Ambon (1999), perang Hindu Islam di India (1947), dan berbagai konflik lainnya.

Dari berbagai peristiwa kekerasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat telah kehilangan ikatan kesucian nilai dan kesadaran nilai fundamental (keadilan, toleransi, pluralisme, perdamaian dan keharmonisan) dalam menegakkan perdamaian. Masyarakat justru saling mencurigai satu sama lain atas dasar kebenaran masing-masing pemahaman dan keyakinan. Di sisi lain secara historis memang kekerasan berakar dari “tradisi kekerasan atas nama Tuhan” yang tersurat pada inti teks-teks suci agama-agama, di mana otoritas agama takut mempertanyakan secara kritis karena “mempertanyakan” dianggap mengancam kebenaran pesan suci Tuhan, atau mengoyahkan dasar keimanan. Bahkan sebelum menginterpretasi teks, lingkup pemahaman telah dibatasi oleh struktur yang dominan, yaitu kekerasan (Racmawan dan Setiawan. 2007: 8-9). Lalu apa yang salah dari pemahaman dan pemaknaan terhadap agama agama? Disini lah penulis melakukan research literatur untuk melihat potensi dan aksi agama, gerakan dan pemikiran dalam pembangunan perdamaian umat beragama yang plural, dinamis dan multikultural.

## METODELOGI

Penelitian ini adalah kajian literature (*literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji secara kritis gagasan, pengetahuan, temuan yang ada dalam literature dan dokumen,

dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan perspektif sosiologis agama. Metode pengumpulan data literatur dan dokumen analisis kritis kepustakaan, dan obyek penelitiannya menggunakan informasi kepustakaan, buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen.

## PEMBAHASAN

### Potensi Agama dalam Pembangunan Perdamaian

Dalam kehidupan agama-agama besar dunia memiliki beberapa pernyataan penting, melalui pemimpin agama mereka dengan membuat komitmen terhadap nilai perdamaian, baik yang terdapat dalam teks klasik maupun perumusan kembali secara kontekstual dalam kehidupan modern (Gopin dkk, 2000:13). Namun dalam konteks yang berbeda terjadi perang suci dan adanya konsep jihad yang seringkali dipahami secara salah dan berimplikasi terhadap munculnya konflik agama. Sehingga dengan legitimasi, agama telah menjadi justifikasi atas terjadinya kekerasan, karena pada konteks keberagamaan seringkali kekerasan digunakan atas nama kebaikan (kebenaran), atau di sisi lain kekerasan juga terjadi atas nama tuhan (*faith*) (Kurtz, 1995: 215). Karena seperti telah di singgung di atas bahwa pemahaman dan tindakan atas nama agama sepanjang sejarah memiliki implikasi terhadap kekerasan dan perang. Dalam tiga 175illennia masa lalu, jutaan telah terbunuh atas nama tuhan dan meskipun adanya pengasingan dan terjadinya perlawanan yang cukup keras terhadap pembunuhan yang dinyatakan oleh agama besar di dunia (Carter dan Smith, 2004:279).

Di sisi lain sebagian kecil mereka memperkenalkan, seperti uskup sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai kontributor terhadap “*intolerance*, (pelanggaran hak asasi manusia) *human rights violations and violent extremism*” penderitaan dunia yang berawal abad 21. Namun disisi lain, dapat dipahami ada semacam tawaran, *suggestions* bahwa agama menjadi kekuatan dalam berperan sebagai pencegah konflik (*conflict prevention*), peringan atau kelonggaran ketegangan konflik (*mitigation*) dan sekaligus sebagai resolusi (*resolution*) atau *peacemaking and post-conflict peacebuilding*, namun seringkali perjumpaan dengan beberapa sikap ketidakpercayaan yang mengakibatkan terjadinya oposisi, dan tidak adanya ruang bagi pemahaman yang inklusif sebagai bagian dari resolusi konflik dan perdamaian. (Carter dan Smith, 2004)

Namun seringkali ketegangan-ketegangan antar agama terjadi di samping adanya persoalan sosial-budaya, kemiskinan, pendidikan dan politik kemudian ada kesalahpahaman

(*understanding*) yang berujung pada ancaman satu sama lain yang diakibatkan adanya “standar ganda” (*double standar*), melalui standar ini yang kemudian memunculkan prasangka-prasangka sosiologis dan teologis yang telah menjadi tradisi (Goddard dkk, 1995). Sehingga ketika nilai-nilai perdamaian yang menjadi substansi agama tidak mampu menjadi konsensus dalam upaya *peacebuilding*, maka ketegangan-ketegangan itu akan tetap menjadi fenomena konflik, kecurigaan atau *violence* yang bersifat laten menjadi gunung es yang terus menggeking. Secara historitas kehidupan masyarakat tidak bisa lepas dari adanya konflik, eksistensi agama seringkali menjadi penyokong dalam terjadinya *violence, wars*, kebencian dan *intolerance*. Namun di sisi lain agama mempunyai potensi yang sangat krusial dan besar dalam upaya menyokong pembangunan perdamaian, karena agama merupakan perangkat nilai, kultur perdamaian, empati, adanya keterbukaan, apresiasi terhadap hak asasi manusia, dan adanya sifat kerendahan hati, sehingga peran agama secara sosiologis sangat penting menciptakan dan sebagai alat perdamaian, rekonsiliasi atau bahkan resolusi konflik, karena kekuatan dari akar rumput dan penguatan sistem nilai social budaya-religius menjadi ruh bagi terciptanya kohesi sosial, keteraturan, konsensus sosial sehingga hal ini turut bentuk struktur nilai sosio-religius, struktur berpikir secara masif yang melahirkan kesadaran kolektif akan penringnya perdamaian, (Dendi, 2017)

Dalam upaya resolusi konflik agama (Carter dan Smith, 2004:280), paling tidak ada dua hal yang seringkali menjadi tantangan, yaitu; *pertama*, tantangan secara nyata memaknai *the religious content* secara khusus atas berbagai peristiwa konflik dan hubungan faktor sebab akibat yang lain atas kekerasan konflik, yang sebagian besar khususnya merupakan pengaruh dari keinginan-keinginan struktur, ekonomi, politik, kekuasaan dan perubahan sosial. Sebagai contoh peristiwa 11 september merupakan peringatan yang mengilustrasikan konflik abad 21 yang cukup kompleks dan itu tentu sangat mengerikan, sehingga di sini harus ada pencegahan yang efektif dan menjadi alat manajemen konflik. *Kedua*, tantangan pada penyatuan kearifan spirit dan teknik tradisi agama-agama dunia ke dalam politik, dan praktek manajemen konflik kontemporer, multikultural, resolusi, dan pencegahan. Karena agama merupakan dinamika konflik dan *peacemaking*, sehingga menghadapi isu-isu era globalisasi yang sensitif, agama dunia harus berperan besar dalam konteks social religius sekaligus menjadi kekuatan nilai, cara berpikir dan cara bertindak.

Kemudian yang lebih penting lagi bagaimana *reintegrating religion into society, and politics, specifically for its peace-promoting potential*. Sehingga agama-agama besar dunia di

tuntut bagaimana upaya untuk mencegah (*prevent*), meredam (*mitigate*), dan *resolve conflict* dan usaha pemeliharaan pembangunan perdamaian (*to nurture peacebuilding efforts*). Hal ini sangat lah penting, karena seringkali kita kehilangan kekuatan (pengetahuan, kearifan, ketegasan dan keterbukaan) dalam menginternalisasikan nilai-nilai ada kedalam konteks social dan politik, dan disinilah nilai-nilai agama diharapkan memberikan kontribusi bagi pencegahan, meredam dan menyelesaikan konflik dan ketidaktoleran dalam konteks masyarakat plural dan multicultural seperti di Indonesia.

Menyadari bahwa dinakina konflik yang terjadi, seringkali konflik merupakan akibat dari kekuatan perjalanan perubahan sosial dan juga nilai social,(Potitras dan Renaud, 1997) yang tidak mampu kita atasi secara serius dalam koteks perubahan dan dinamika globalisasi dan modernisasi, yang seharus membutuhkan kekuatan ilmu pengetahuan, dan perubahan paradigm dan memiliki *word view* dalam melihat masa depan peradaban manusia, perbedaan, dinamika politik dan multikulturalisme bagian kehidupan kita yang tidak bisa pisahkan yang pada akhirnya mampu melahirkan keteraturan sosial (Dendi, 2018)

Di masa depan situasi ketergantungan, konflik seringkali juga memberikan dampak disintegrasi dan juga kemanfaatan sosial dalam hal kerjasama antar kelompok, rekonsiliasi atas kepentingan, penyatuan solusi dan sebagainya terjadi lebih kuat dan mampu mengakhiri ketegangan dan kecurigaan satu sama lain. Di sisi lain ketika tejadinya perubahan pada masyarakat agama, tentu hal ini berpengaruh terhadap struktur doktrin agama, karena kondisi struktur doktrin mempunyai sensitivitas yang berbeda dalam antar komunitas terhadap berbagai perubahan yang terjadi (Alatas, 1972: 133). Karena tidak ada agama yang bebas dari kultur latar belakang sosial kehidupanan komunitas, dalam kondisi tertentu seringkali agama dan *social change* mengalami konflik sebagai akibat perbedaan niali dalam kehidupan sosial.

Konflik yang sering terjadi di masyarakat multicultural sangat kompleks, yang seringkali tidak hanya konflik berlatar belakang agama namun konflik-konflik sosio-religius, etno-nasional yang tidak memenuhi kriteria tersebut dapat dianggap sebagai ‘kekerasan komunal’ (*communal violence*) dan perang internal wilayah. Dalam kajian ini konflik ‘intrastate’ dibagi ke dalam kelompok-kelompok berbasis etnis, agama, dan ideologi. Kelompok-kelompok ini berhubungan dengan apa yang disebut ‘etno-nasionalis.’ Konflik etnis telah menjadi fenomena yang meluas. Telah banyak contoh konflik-konflik ‘intrastate’ sejak berakhirnya Perang Dunia II, antara lain: Korea, Vietnam, Sri Lanka, Kambodja, Pakistan, Afghanistan, Cyprus, Lebanon, Jordania, Iraq, Cuba, El Salvador, Nicaragua,

Nigeria, Sudan, Angola, Zaire, Rwanda, Ethiopia, Chad, bekas Uni Soviet dan Yugoslavia, sekedar menyebut beberapa contoh.

Alasan memusatkan perhatian pada konflik etnis adalah sebagian besar konflik-konflik ini berkobar di negara-negara miskin. Akibatnya, konflik-konflik ini semakin memperparah kemiskinan Negara-negara ini dengan hancurnya basis-basis ekonominya yang memang telah rapuh dan menimbulkan penderitaan tiada akhir terhadap generasi demi generasi rakyatnya. Namun di tengah berbagai gejolak konflik yang terjadi, ada semacam tawaran resolusi konflik dari John N. Paden, dengan mencermati berbagai gejolak di Nigeria, seperti kurang harmonisnya hubungan antar Kristen dan Islam, persoalan politik, kemudian yang menyangkut persoalan *localized ethnoreligions, civic culture, political values, authority and social change*, sehingga persoalan *value system* menjadi sangat penting, terutama persoalan agama, sehingga sangat dibutuhkan adanya afiliasi untuk menghilangkan perbedaan dalam upaya pembangunan, dan selain itu adanya *power sharing* (Paden, 2005). dengan harapan menghilangkan ketegangan antar sektor, ideology, politik, budaya dan agama satu sama lain.

### **Aksi Agamawan dalam Upaya Membangun perdamaian**

Setelah membicarakan berbagai potensi agama dalam upaya *peace building*, maka ada beberapa *keyword* yang dilakukan oleh para agamawan untuk sebagai upaya pencegahan terhadap konflik di masyarakat agama dan membangun perdamaian paska konflik (*post-conflict peacebuilding*), antarlain (Carter dan Smith, 2004):

1. Pemimpin agama hendaknya bersikap netral, baik sebagai bagian dari komunitas yang berkonflik ataupun sebagai orang luar. Namun pemimpin agama dituntut sebagai penengah atas konflik yang terjadi, sehingga dapat menawarkan perdamaian baik lewat seruan atau ajakan kepada pentingnya prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kedamaian yang dimiliki oleh semua agama-agama besar dunia, khususnya tentang *tolerance values* dan *non-violence*. Sehingga mampu mengeliminir atau mengurangi ketegangan konflik, dan sekaligus menyadarkan bahwa perdamaian merupakan tanggungjawab bersama.
2. Sebagai bentuk pencegahan terjadinya konflik yang membara, para pemimpin agama harus merespon secara efektif dan memprediksi akses-akses yang akan timbul terhadap teman-teman kelompok agamanya sendiri. Mereka harus dapat menyakinkan bahwa

keimanan atau kepercayaan mereka selamanya tidak boleh digunakan untuk membenarkan tindakan menyerang kelompok lain atau melakukan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Jika anggota kelompok agama lain menganjurkan tindakan-tindakan yang bersifat tidak toleran, permusuhan atau kekerasan. Pemimpin agama harus bersikap tegas terhadap tindakan mereka demi menghindari konflik.

3. Para pemimpin agama hendaknya dapat menjaga jarak dan mewaspadaai adanya kecenderungan penggunaan agama dan ajaran-ajarannya sebagai alat untuk meraih tujuan-tujuan politik yang membahayakan. Jika para pemimpin agama meneukan bahwa ajaran-ajaran agamanya telah dieksploitasi atau disalah gunakan, maka mereka harus mendorong para pengikutnya untuk “kembali ke ajaran dasar” dan mendeklarsikan dan menyatakan kembali dengan tegas kepada ajaran-ajaran agama yang semula yang bersifat anti kekerasan.
4. Sebagai langkah pencegahan terhadap konflik, para pemimpin agama dan pengikut-pengikutnya hendaknya menghargai dan menghormati kepercayaan dan keimanan yang dianut oleh kelompok lain, atau adanya sikap toleransi. Dengan begitu, tindakan missi, dakwa atau kegiatan zending yang hendak sengaja mengubah atau memindahkan kepemelukan agama dari agama tertentu ke yang lain atau anjuran untuk pindah agama selamanya tidak boleh dilakukan secara paksa.
5. Untuk menyumbang ke arah terwujudnya perdamaian, para pemimpin agama dapat mewajibkan dirinya belajar tentang kepercayaan dan agama orang atau kelompok lain mempercayai, menyakini, mengimani dan berperilaku seperti yang mereka lakukan selam ini. Para pemimpin agama sepakat mendorong para pengikutnya, dan para tokoh dan pimpinan masyarakat yang sekuler maupun yang agamis yang lain untuk berbuat hal yang serupa. Mereka dapat menawarkan program untuk mengajar atau menjelaskan pokok-pokok ajaran yang dimiliki orang atau kelompok lain kolega seagamanya serta mendukung adanya inisiatif-inisiatif baru yang bersipat antara iman (*interfaith*).
6. Para pemimpin dan tokoh agama dapat memerankan para yang sangat berpengaruh dan didukung pula oleh data dan informasi yang mereka miliki di dalam mendeteksi dan mencium tanda-tanda peringatan dini tentang kemungkinan munculnya tindakan kekerasan. Untuk mencegah agar tidak terjadi konflik dan kekerasan, mereka dapat berpedoman dan mempromosikan norma-norma tentang hak asasi manusia yang paling dasar dan juga aturan main yang berdasarkan hukum yang berlaku. Namun jika hukum

dan norma-norma internasional dilanggar, maka mereka dapat membawa kasus-kasus pelanggaran ke PBB atau ke media. Mereka bias membantu para korban untuk memperoleh tempat pengungsian dan perlindungan.

7. Salah satu bentuk sumbangan paling berharga yang dapat diberikan oleh para pemimpin agama untuk mencegah terjadinya konflik adalah memposisikan diri mereka sebagai contoh atau teladan bagi para pengikutnya. Mereka dapat bertindak sebagai tauladan pemimpin yang bersikap toleran dan inklusif. Mereka dapat menentang dan mengurangi bentuk-bentuk diskriminasi dan tindakan *stereotyping* kita mereka menemukannya di lapangan. Mereka dapat menghimbau dan mengajak untuk selalu menggunakan cara-cara yang santun untuk menolak sustau tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekerasan sebagai pilihan yang efektif untuk menyatakan ketidaksetujuan atau penolakan yang ditunjukkan secara kasar, penuh kekerasan. Ketika mereka dihadapkan pada ekstrimitas, mereka dapat melihat apa yang adadibalik tindakan masyarakat untuk mencermati factor-faktor penyebab atau adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yang mungkin mendorong mereka berbuat nekad dan kemudian membantu mereka menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan cara-cara yang lebih konstruktif dan damai.
8. Banyak hal yang dapat dilakukan para pemimpin agama untuk mencegah timbulnya konflik yang keras, namun sumbangan terbesar mereka terletak pada kemampuan mereka membantu mengatur dan mengurai benangkusut atas konflik. Namun lebih jauh, apakah agama memang telah menjadi penyebab langsung terjadinya pertikaian dan perselisihan ataukah tidak. Tetapi yang pasti agama sangat penting bagi kedua belah pihak yang bertikai. Seringkali agama mempunyai peran yang sangat sentral bagi pembentukan identitas, kepercayaan dan harapan mereka. Karena alas an itulah maka agama dapat memerankan peran yang sangat penting untuk memperbaiki, memulihkan dan mengokohkan perdamaian.
9. Aktor-aktor keagamaan dan para pemimpin agama seringkali memiliki keuntungan, karena pada umumnya, para pemimpin agama mempunyai reputasi yang baik dalam dalam hak kejujuran, integrasi, posisi di tengah (*impartiality*), taat hukum (*fairness*) dan rasa kasih sayang bahkan untuk orang-orang atau kelompok yang tidak seagama atau segolongan dengan mereka. Mereka juga punya hubungan dengan organisasi penyandang dana internasional yang besar, yang sewaktu-waktu bisa mereka kontak untuk memberikan bantuan. Ini semua memungkinkan para pemimpin agama untuk bertindak



dan megerahkan segala potensi yang dimiliki lebih cepat dari pada pemerintah maupun aktor-aktor non-pemerintah. Para aktor agama seringkali memiliki pengetahuan tangan pertama tentang isu-isu lokal, dapat bekerjasama dengan penduduk lokal setempat dengan mudah, dan seringkali memperoleh tingkat kekebalan politik yang tinggi. Ketika para aktor dan pemimpin agama memang memiliki sifat-sifat mulia tersebut, seharusnya mereka dapat menggunakannya untuk kebaikan masyarakat secara umum.

10. Ketika bekerja melakukan pertolongan untuk mengatur lalu lintas dan mengurangi konflik, para pemimpin agama hendaknya bersedia secara suka rela untuk melibatkan diri secara dini dan membuat komitmen jangka panjang untuk membantu kelompok yang bertikai. Sepanjang itu pula, mereka dapat menghalkan dan mengurai tindak kekerasan dan mendorong untuk berani melakukan dialog-pembicaraan antara mereka yang berselisih. Mereka dapat mengirim pesan timbal-balik antara para aktor yang berselisih dan menyiapkan tempat khusus di mana para pelaku yang berselisih dapat bertemu dan berbicara secara aman. Mereka dapat mengusulkan cara-cara mengurai konflik dengan mengingatkan para yang bertikai bahwa nilai-nilai kebaikan seperti rasa kasih sayang, mentaati hukum, keadilan, menghormati orang atau kelompok lain, dan rendah hati adalah sifat-sifat yang dapat mendukung terwujudnya perdamaian, malah menjadi syarat yang tidak bisa ditawar-tawar. Ketika menolong pemimpin kelompok yang sedang berselisih agar membantu mereka memutuskan kapan menyerah dan melakukan kompromi. Mereka juga dapat membantu para aktor yang berselisih menyelamatkan muka atau membuang perasaan malu, jika perlu. Tutunan seperti itu diharapkan dapat memberikan pasilitas dan akomodasi bagi para pemimpin yang berselisih, bahkan dapat memberikan para pemimpin yang berselisih cara-cara yang dapat diterima untuk membuat tawaran konsesi-konsesi dan mengakhiri permusuhan tanpa berisiko ditolak atau dicucilkan oleh kelompok pendukungnya bahkan resiko kehilangan keselamatan jiwa.
11. Dalam rangka menyambung membangun perdamaian (*peace building*) paska konflik, para pemimpin agama dapat membimbing dan menuntun proses pengungkapan rasa penyesalan, pertaubatan, menunjukkan perasaan iba, kesedihan, pemberian maaf, yang semuanya itu harus terjadi terlebih dahulu sebelum langkah mengurai konflik dan perdamaian yang sesungguhnya dimungkinkan. Para pemimpin agama dapat menyakinkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh pihak-pihak yang bertikai. Mereka

dapat mendorong para tokoh dan kelompok yang berselisih untuk melakukan penyelesaian bersama-sama dan membantu mereka menciptakan upacara, ritual bersama, dan membangun moment yang dapat membantu menyembuhkan luka para kelompok yang bertikai. Para pemimpin agama dapat mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk saling memaafkan dan saling menawarkan proses rujuk kembali (*reconciliation*) yang tulus, mendasar dan konsisten. Jika ternyata lembaga-lembaga agama yang ada di daerah konflik ternyata dalam posisi salah, maka para pemimpinnya dapat secara terbuka mengakui kesalahan- kesalahan yang mereka perbuat, meminta maaf dan menunjukkan langka-langka perbaikan bagi solusi atau resolusi konflik.

12. Para pemimpin agama dapat mengajak para aktor yang berselisih untuk mengalihkan perhatian mereka ke masa depan, ke masyarakat dalam bentuk hubungan sosial yang seharusnya dibangun. Mereka dapat membantu para aktor yang bertikai untuk merubah cara berfikir mereka, perilaku dan tindakan, dan corak hubungan social untuk membentuk jalan bagi tercapainya perubahan yang tulus dan mendasar. Ketika menolong para aktor yang bertikai untuk merancang dan memulai kerja ke arah visi baru untuk kehidupan masa depan, para pemimpin agama dapat membantu mereka menenmukan dan memilih pendapat yang berguna dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih. Pada tahap ini, berdoa bersama untuk memperoleh petunjuk terbaik agar dapat menentukan ketetapan yang bijak dan tepat. Para pemimpin agama dapat mendorong kelompok yang berselisih untuk dapat lebih kreatif, dan belajar bagaimana bekerjasama antar mereka dan juga dengan pihak-pihak lain di luar mereka.
13. Lebih penting dari itu semua, para pemimpin agama dapat menghimbau dan meminta kepada seluruh kelompok yang berselisih untuk mendasarkan apa saja yang akan mereka lakukan di atas landasan kepercayaan spiritual mereka dan di atas nilai-nilai yang disetujui bersama. Dalam konflik yang melibatkan perbedaan agama, para pemimpin agama dapat berbicara langsung dan lebih otoritatif dalam menyentujantung kepercayaan dan keimanan yang diyakini benar oleh para tokoh kelompok yang bertikai. Sedangkan dalam konflik yang tidak secara tegas terkait langsung dengan agama, para pemimpin agama boleh menghimbau lewat standar moral dan nilai-nilai yang umum (nilai-nilai universal tentang perdamaian, dan sebagainya) yang menjadi pedoman, lewat spritualitas, atau lewat keinginan untuk meraih tujuan perdamaian dan keadilan yang lebih tinggi. Dengan cara memasukan dimensi spritualitas dalam proses perundingan dan negosiasi.

Para pemimpin dapat mengangkat mereka yang berselisih ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan cara menghimbau untuk mempertimbangkan secara serius nilai-nilai, para pemimpin agama dapat memberikan inspirasi kepada tokoh yang berselisih untuk bergerak ke luar dari posisi yang semula mereka pertahankan dan mampu melihat secara luas dalam kerangka tanggungjawab mereka untuk mengakhiri pertikaian dan penderitaan serta kepedihan yang mereka rasakan selama ini.

Melalui berbagai aksi para pemimpin agama di atas dalam upaya pembangunan perdamaian yang sangat diperlukan bagi semua pihak, khususnya dalam menyikapi kehidupan yang kompleks dan multikultural. Maka paling tidak sudah ada upaya pencegahan, rekonsiliasi sebagai upaya menekan atau mengeliminir potensi konflik agama. Namun di sisi lain upaya ini harus diimbangi dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat, sosio-kultur, elit politik, NGo, akar rumput, ekonomi-politik, serta adanya iklim politik yang lebih kondusif dalam upaya membangun perdamaian sehingga semua pihak bisa lebih jernih dalam melihat segala perbedaan yang ada baik secara vertical maupun horizontal dalam berbagai level kehidupan social budaya.

### **Peran *Politict Leadership* dan *NGo Leadership* Dalam Upaya Perdamaian**

Dengan kompleksnya berbagai persoalan yang dihadapi dalam masyarakat agama dan multikultural, setidaknya ada tiga komponen yang paling berperan dalam upaya *peace building* (Judy, 2004) yaitu; *religion leadership*, *Politict Leadership* dan *NGo Leadership*. Sehingga benturan-benturan keras persoalan *intolerance*, *human righ violence* dan *violence extrimest*. Dalam artian ketika terjadinya konflik antara pemimpin agama, antar budaya dan pemimpin politik, maka ada pihak ketiga yaitu NGo yang memebrikan control dalam upaya rekonsiliasi dalam menemukan consensus dan kesepemahan yang mampu mengeliminir potensi dan penyelesaian konflik. Karena dalam waktu bersamaan kekerasan atau konflik sangat membutuhkan adanya *conflict prevention*, *conflict resolution*, dan *conflict managenet* dan juga kita sangat membutuhkan ada kekuatan modal sosial, sistem sosial, pranata sosial yang mampu merekatkan masing-masing unsur yang mempu menciptakan kohesi sosial, konsensus sosial dan integrasi social yang pada akhirnya mampu melahirkan keharmonisan sosial, (Dendi, 2018).

Karena *religion potention* selalu membayang-bayangi seperti persoalan, dogma, ritual, teks, pemimpin (*leadership*), historis, moralitas dan institusi. Sehingga dengan kondisi

seperti ini, maka sangat dibutuhkan *cummunality shared values*, sehingga sikap-sikap seperti *charity, honesly, fairness, justice, respect, self-diciplin* dan *impartiality* sebagai upaya dalam pembangunan perdamaian, yang disertai *skill negotiation, dialogue, reconciliation, concencuse, compromise*, dan *mediasi* dalam mencari jalan damai (Carter dan Smith, 2004).

## KESIMPULAN

Dalam kehidupan beragama, setiap agama dipastikan menyerukan nilai-nilai perdamaian, dan menolak berbagai bentuk ketidakadilan, kekerasan, *intolerance*, dan diskriminasi. Namun yang seringkali menjadi persoalan justru ketika doktrinal dan nilai perdamaian, keadilan dibenturkan pada konteks sosio-kultur dan politik atas nama kebenaran dan kesucian. Sehingga banyak kekerasan dan perang dilakukan atas nama pembelaan terhadap tuhan. Padahal apakah Tuhan perlu dibela? Sehingga kekerasan di masyarakat multikultural menjadi fenomena dan tantangan, baik lokal, regional dan bahkan internasional, baik secara horizontal anatar budaya, agama, komunitas, ataupun secara vertical agama dan negara, masyarakat versus negara, dan tentu hal ini perlu kita cermati dalam upaya pembangunan perdamaian.

Dalam masyarakat yang plural, multikultural (kultur, agama, ras, politik dan ekonomi), seringkali perdamaian (keharmonisan) hanya menjadi sesuatu yang “utopis”, karena pesan agama dan nilai suci tentang perdamaian, kerukunan, saling pengertian dan toleransi selalu mengalami persinggungan-persinggungan yang sangat tajam dan berpotensi melahirkan konflik. Sehingga apapun upaya rekonsiliasi atas konflik, maka peran kesadaran sosio-kultur masyarakat sangat krusial, sehingga mampu mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam konteks sosial, politik, kebudayaan, negara, ekonomi yang kemudian membentuk relasi yang harmonis, pembangunan dan *peacefull*.

Terakhir dalam masyarakat agama yang kompleksnya majemuk berbagai persoalan yang dihadapi, setidaknya ada tiga komponen yang paling krusial dalam upaya *peace building*, yaitu; *religion leadership, Politict Leadership* dan *NGo Leadership*, sehingga salah satu pihak mampu menjadi pihak ketiga (mediator) dalam upaya rekonsiliasi ataupun dalam upaya membangun consensus, integrasi dan perdamaian di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussein. (1972) *Modernization and Social Change*. Sydney: Angus and Robertson. Ltd.
- Carter, Judy & Gordon S. Smith. (2004). *Religious Peacebuilding: From Potential to Action*. within Harold Coward and Gordon S. Smith (Eds), *Religion and Peace Building*. Albany: State University on New York Press.
- Gopin, Marc *Eden and Armageddon*. (2000). Oxford University Press
- Goddard, Hugh. (1995). *Cristians and Muslim; From Daouble Sstandars to Mutual Understanding*. Surry: Curzon Press.
- Kurtz, Lester. (1995). *Gods in the Globa Village the World's Religions in Sociological Perspective*. California: Pine Forge Press.
- Markham, Ian and Ibrahim M.Abu-Rabi (Eds). (2002). *September 11: Religious Perspectives on the Causes and Consequences*. England: Oneword Oxford.
- Paden, John N. (2005). *Muslim Civic Cultures and Conflic Resolution*, Washington, D.C: Brookings Institution Press.
- Pallmayer, Jack Nelson. (2007). *Is Religion Killing Us?*, terj. Hatib Rachmawan dan Bobby Setiawan. Yogyakarta: Pustaka Kahfi.
- Potitras, Jean and Pierre Renaud. (1997). *Mediation and Reconciliation of Interests in Public Disputes* (Ontario: Carswell, 1997).
- Sutarto, Dendi. (2017). *Integrasi dan Interkoneksi Keilmuan Dalam Perspektif Sosiologis*, dalam Jurnal *Indonesian Community for Development Islamic of Civilization*, Yogyakarta: 1 (1).
- Sutarto, Dendi. (2017). *Epistemologi Keilmuan Integratif-Interkonektif M. Amin Abdullah dan Resolusi Konflik*, dalam Jurnal Trias Politika: 1 (2).
- Sutarto, Dendi. (2018). *Konflik Antara Agama dan Sains dalam Perspektif Filsafat Sosial*, dalam Jurnal Trias Politika: 2 (1).